

Determinan Kemiskinan di Provinsi Riau

Abdul Aliem Siddique✉

BPS Kabupaten Indragiri Hilir, RIAU

aliemsiddiq@bps.go.id

Abstract

Poverty is one of the problems faced by countries in the world, including Indonesia and this problem does not only occur at the national level but also at the regional level. Riau is an area that has a good level of an economy, but if you look at the number of poor people it still tends to be high and the rate of decline in the number of poor people tends to slow from year to year. To find out what factors can reduce poverty in Riau, this study uses three variables, namely economic growth, HDI and the open unemployment rate, and the 2017 - 2019 time period. The analysis used is panel regression analysis. Of the three variables, only HDI significantly affects poverty at a level of 5 percent.

Keywords: Poverty, Panel Regression Analysis, Economic Growth, IPM, Open Unemployment Rate.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia dan masalah ini juga tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat regional. Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, namun jika diperhatikan jumlah penduduk miskinnya masih cenderung tinggi dan laju penurunan jumlah penduduk miskinnya cenderung melambat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui faktor apa yang dapat menurunkan kemiskinan di Riau, pada penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka dan periode waktu 2017 – 2019. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi panel. Dari ketiga variabel tersebut hanya IPM yang signifikan memengaruhi kemiskinan dengan taraf 5 persen.

Kata kunci: Kemiskinan, Analisis Regresi Panel, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu atau masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama bagi negara yang sedang berkembang [1]. Pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir dari suatu negara [2]. Berbagai pemikiran maupun konsep tentang kemiskinan telah di kaji dan diadaptasi oleh berbagai negara sedang berkembang [3]. Namun, masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sebagai salah satu negara sedang berkembang, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan [4]. Tercatat pada Maret 2019, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,41 persen, jika dilihat dari jumlah, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 25,14 juta orang [5]. Angka ini mengalami penurunan dari kondisi tahun sebelumnya. Jumlah dan persentase disajikan pada Gambar 1.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya terfokus di tingkat pusat saja, namun juga pada tingkat regional atau daerah. Provinsi Riau yang merupakan salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Pulau Sumatera, juga mengalami masalah kemiskinan [6]. Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah Riau dalam mengentaskan kemiskinan, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS) dan lain-lain.

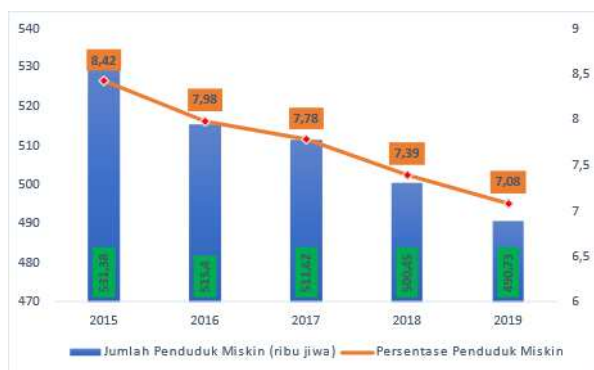
Program-program ini ikut membantu menekan angka kemiskinan [7].



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2015-2019

Kondisi kemiskinan di Provinsi Riau mengalami penurunan dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,64 persen dari tahun 2014. Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 490,72 ribu jiwa, menurun 1,98 persen dari tahun sebelumnya [8]. Namun, penurunan ini tidak terjadi di seluruh wilayah Riau dimana masih ada kabupaten yang angka kemiskinan masih 2 digit, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu [9]. Walaupun jumlah penduduk miskin terus turun dari tahun ke

tahun, laju pertumbuhan penduduk miskinnya cenderung melambat [10] [11]. Jumlah dan persentase disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau, 2015-2019

Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*) [12] [13] [14]. Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai [15] [16] [17]. Cara mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan [18] [19] [20]. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi [21] [22] [23].

Berdasarkan jumlah pengangguran di Riau mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah pengangguran di Riau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan sebesar 4,46 persen dari total tahun sebelumnya sebesar 184.564 jiwa dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,3 persen dari tahun sebelumnya [24] [25] [26]. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Riau selalu tumbuh rata-rata 2,5 persen dalam 3 tahun terakhir serta untuk pendidikan yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir [27] [28] [29]. Peningkatan IPM Provinsi Riau sebesar 1,21 poin [30] [31]. Oleh karena itu, penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh PDRB, IPM dan jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Riau [32] [33].

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan konsep dari pembangunan ekonomi [34] [35]. Harapan pembangunan ekonomi adalah untuk

membawa perbaikan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, standart pendidikan yang lebih baik atau perbaikan Kesehatan [36] [37]. Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan. Menurut World Bank, pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari lingkaran kemiskinan [38].

Salah satu indikator pendidikan dapat dilihat dari tingkat IPM. IPM menurut BPS merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan manusia di suatu daerah atau negara yang diukur dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Disisi lain pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan [39]. Pengangguran, setengah menganggur atau kurangnya lahan produktif sebagai aset penghasil pendapatan merupakan hal yang akut bagi masyarakat miskin ketika dalam memperoleh kebutuhan paling dasar untuk makanan, air dan tempat tinggal adalah hal yang harus diperjuangkan pada setiap harinya [40].

Agar kemiskinan tidak semakin akut, maka pemerintah harus meletakkan kemiskinan menjadi pusat perhatian, beberapa ahli menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan yang paling jitu adalah dengan menciptakan aktivitas ekonomi pada daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru sehingga berkurangnya pengangguran yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang nanti akan dapat mengurangi kemiskinan yang ada.

2. Metodologi Penelitian

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Variabel y , persentase penduduk miskin kabupaten/kota dengan satuan persen
- Variabel x_1 , pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan satuan persen
- Variabel x_2 , IPM kabupaten/kota dengan metode penghitungan terbaru
- Variabel x_3 , tingkat pengangguran terbuka kabupaten kota dengan satuan persen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari BPS baik tingkat pusat maupun daerah. Periode waktu yang digunakan selama tiga tahun yaitu 2017 – 2019. Alat analisis pada penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi STATA 14 dan Microsoft excel. Dalam tahapannya, untuk mendapatkan model terbaik, dilakukan tiga tahap, yaitu pertama dilakukan uji Chow untuk menentukan model yang baik antara *commen effect* atau *fixed effect*. Setelah itu dilakukan uji Hausman untuk menentukan model mana yang baik

antara model *fixed effect* atau *random effect*. Terakhir uji LM Breusch-Pagan, untuk mengetahui model mana yang akan digunakan antara *random effect* atau *common effect*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah pengangguran. Model yang digunakan disajikan pada Persamaan (1).

$$y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon$$

Dimana Y adalah persentase penduduk miskin, X_1 adalah pertumbuhan ekonomi, X_2 adalah IPM, dan X_3 adalah tingkat pengangguran terbuka (tpt).

3. Hasil dan Pembahasan

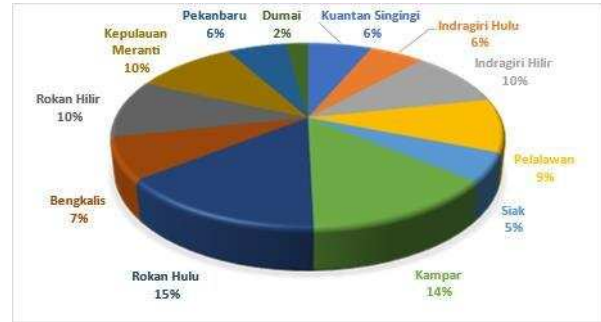
Jumlah penduduk miskin Riau selalu turun dari tahun ke tahun. Namun, ketika dijabarkan per kabupaten kota, tidak semua kabupaten kota yang mengalami penurunan. Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Rokan Hilir mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2018 – 2019 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Riau, 2018-2019 (ribu jiwa)

Jika dilihat dari kontribusi jumlah kemiskinan per kabupaten kota, masih banyak kabupaten kota yang kontribusi kemiskinannya berada di angka 5 persen. Pada tahun 2019, hanya Kabupaten Siak dan Kota Dumai yang berada di bawah 5 persen, selebihnya kabupaten kota berada di atas 5 persen. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Siak dan

Kota Dumai tidak sebesar kabupaten dan kota lainnya. Kontribusi terbesar dari Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu, masing-masing sebesar 14 dan 15 persen disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin Riau Tahun 2019

Model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*. Dari tiga variabel bebas yang digunakan, hanya variabel IPM yang signifikan memengaruhi terhadap variable tidak bebas yaitu jumlah penduduk miskin pada alfa 5 persen. IPM memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai IPM suatu daerah baik kabupaten maupun kota maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Sementara dua variabel bebas lainnya tidak signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini sama seperti dengan hasil penelitian dari Barika (2013) yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Se Sumatera. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang ada lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada investasi atau modal. TPT juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ketut & Endrayani 2016). Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua yang menganggur adalah masyarakat miskin, atau mereka yang menganggur masih dihidupi oleh orang yang memiliki pendapatan yang cukup.

Tabel. 1 Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Kemiskinan	Coef	Std. Err	z	p> z	95% Conf Interval
Pertumbuhan Ekonomi	-.0373589	1022901	-0.37	0.715	-2378439 1631261
IPM	-.7078536	0909004	7.79	0.000	-8860151 -529692
TPT	-.1228206	0680604	-1.80	0.071	-2562167 0105754
_Cons	60.08045	6.740079	8.91	0.000	46.87013 73.29076
Sigma_u	5.2559798	0	0	0	0
Sigma_e	.27094252	0	0	0	0
rho	.99734970	0	0	0	0

Dari Tabel 1 bahwa ketiga variabel memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan (persentase penduduk miskin). Sehingga dapat diasumsikan ketika variabel bebas meningkat maka dapat mengurangi persentase penduduk miskin di Provinsi Riau.

4. Kesimpulan

Dari data panel yang digunakan pada penelitian ini, didapat hasil bahwa IPM merupakan variabel yang signifikan dalam memengaruhi persentase penduduk miskin dalam taraf nyata 5 persen. Selebihnya variabel tidak signifikan. Jika dilihat dari koefisiennya, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki hubungan negatif dengan persentase

penduduk miskin atau dapat diasumsikan ketika variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka) meningkat maka dapat menurunkan nilai variabel tidak bebas (persentase penduduk miskin).

Daftar Rujukan

- [1] Amin, A. M., Bahri, S., Setianingsih, R., & Ernawati. (2015). Analisis Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Provinsi Riau. In *Seminar Nasional Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia*.
- [2] Zamhari, J., Wisadirana, D., & Kanto, S. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(01), 41–50. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.01.5>.
- [3] Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>.
- [4] Ramadhani, A. W., & Munandar, A. I. (2019). Determinan Kemiskinan Anak Di Provinsi Dki Jakarta: Susenas 2017. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.24843/jekt.2019.v12.i02.p01>.
- [5] Isnaini, S. J., & Nugroho, R. Y. Y. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2018. *Jurnal GeoEkonomi*, 11(2), 176–187.
- [6] Parwodiwiyono, S. (2021). Analisis Determinan Kemiskinan Di Pulau Jawa Dengan Model Regresi Spasial. *Seminar Nasional Geomatika*, 97. DOI: <https://doi.org/10.24895/sng.2020.0-0.1124>.
- [7] Daniel, P. A., Soleh, A., Kurniawan, H., & Firmansyah, D. (2021). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 9(1), 40–51. DOI: <https://doi.org/10.53978/jd.v9i1.171>.
- [8] Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2020). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 466–477. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.17>.
- [9] Suprianto, Rachman, R., & Lestari, W. P. (2019). Analisis Determinan Kemiskinan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 102–114.
- [10] Ramdani, M. (2017). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64.
- [11] Wulandari, H., & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106–116. DOI: <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.136>.
- [12] Bakar, A. (2019). Analisis Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(1), 1–1.
- [13] Iskandar, A., & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan Di Sulawesi Selatan (Determinant Analysis Of Poverty In South Sulawesi). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 1–26. DOI: <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.36>.
- [14] Fairizta, Y. A., Suharno, S., & Anwar, N. (2020). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1207. DOI: <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i12.p04>.
- [15] Diyanayati, K., & Padmiati, E. (2017). Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41, N, 201–214.
- [16] Hardinandar, F. (2019). Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1–12. DOI: <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>.
- [17] Erlando, A., Haryanto, T., & Rositawati, V. (2020). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 89–105. DOI: <https://doi.org/10.23960/jep.v9i2.97>.
- [18] Kharisma, B., & Santoso, T. (2021). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kota Bandung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 626. DOI: <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i07.p05>.
- [19] Aswar, & Subekan, A. (2016). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1–25.
- [20] Roy Hendra. (2010). Determinan Kemiskinan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*, 1(69), 18–38.
- [21] Adnyani, A. W., & Sugiharti, L. (2019). Profil Dan Determinan Kerentanan Kemiskinan Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 10(2), 100–118. DOI: <https://doi.org/10.35724/jies.v10i2.2412>.
- [22] Nina, G. A., & Rustariyuni, S. D. (2020). Determinan Kemiskinan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 24–36. DOI: <https://doi.org/10.23960/jep.v9i1.28>.
- [23] Handalani, R. T. (2019). Determinan Kemiskinan Daerah Provinsi di Indonesia: Tinjauan Kebijakan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 59–80.
- [24] Koestedjo, E. H. (2018). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(1). DOI: <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i1.445>.
- [25] Dolly, S. H. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Samosir. Tesis. *Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan, 7–37.
- [26] Nopriansyah, N., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 119–128. <https://doi.org/10.22437/ppd.v2i3.2268>.
- [27] Marisa, M. (2019). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 2(1), 76. DOI: <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1156>.
- [28] Leasiwal, T. C. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, VII(2), 1–26.
- [29] Megawati, E., & Sebayang, L. K. B. (2018). Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(3), 235–242. DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i3.25255>.
- [30] Mubyarto, N. (2014). Analisis Determinan Kemiskinan di Sumatera. *Journal Development*, 2(2), 40–57. DOI: <https://doi.org/10.53978/jd.v2i2.20>.
- [31] Lukita Sari, R., & Khoirudin, R. (2019). Determinan Tingkat Kemiskinan di Pulau Madura. *Manajemen*, 9(2), 126–136. DOI: <https://doi.org/10.30656/jm.v9i2.1758>.
- [32] Fadila, K. N., & Utomo, A. P. (2021). Determinan Status Kemiskinan Anak Pada Rumah Tangga Krt Perempuan Di Provinsi Bengkulu 2018. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 616–626. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.453>.
- [33] Farid, A., Hailuddin, & Wahyunadi. (2020). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016. *Jurnal Lentera*, 19(1).
- [34] Setyani, A. I., & Sugiarto. (2021). Aplikasi Metode Geographically Weighted Regression Determinan Kemiskinan Multidimensi Kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia.

- Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 5(2), 121–132. DOI: <https://doi.org/10.21009/jsa.05201> .
- [35] Nurafni, H., R. M. Rachmad., & Safri, M. (2021). Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 689–704. DOI: <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15367> .
- [36] Amida, O. V., & Sitorus, J. R. H. (2021). Penerapan Regresi Logistik Biner Multilevel dalam Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Rumah Tangga, dan Wilayah Terhadap Status Kemiskinan Balita di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 967–977. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.569> .
- [37] Parwodiwiyono, S. (2022). Determinan Penduduk Lanjut Usia Miskin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(3), 455–466. DOI: <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i3.510> .
- [38] Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), 128–136. DOI: <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i2.23411> .
- [39] Isnaini, F. N., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Determinan dan Trend Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 120. DOI: <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.121> .
- [40] Fitri, L. M., & Aimon, H. (2019). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 769. DOI: <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7704> .